

SELEKSI CALON KOMISIONER KPU

3 Petahana Lolos, 2 Bacalon Mundur

WONOSARI (KR) - Dua orang bacalon anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang lolos 10 besar memilih mundur tidak mengikuti seleksi lanjutan. Kedua orang tersebut Mugi Hartana dan Deni Tri Utomo. Keduanya mundur lantaran terpilih menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunungkidul.

"Mundurinya kedua bacakom tersebut maka tes lanjutan uji kelayakan dan kepatutan hanya diikuti 8 orang," kata anggota KPU DIY M Zaenuri Ikhsan Kamis (12/10). Sementara itu ada tiga Petahana bakal Calon Komisioner KPU yang lo-

los 10 besar yakni Rohmad Qomarudin Asih Nuryanti, Supami dan anggota Panwaslu di Kapanewon Panggang Antok, Anggota PPK Saptosari Eko Andang Darmawan, Anggota Panwaslu Kapanewon Saptosari Niyati. Kandidat lainnya ada-

lah Irwan Budisusanto dan mantan Anggota Bawaslu Gunungkidul Sudarmanto. Untuk hasil Tes saat ini telah dikirim ke KPU RI.

Tim seleksi maupun anggota KPU DIY hanya melaksanakan tahapan seleksi dan membantu memberikan nilai atas integritas dan independensi, serta pengetahuan tentang kepemiluan, kepemimpinan hingga kemampuan berkomunikasi.

"Nantinya ada pleno KPU RI untuk menetapkan siapa yang terpilih," ujarnya.

Proses pengisian komisioner baru KPU ini tidak

hanya dilakukan di Gunungkidul namun juga di tiga kabupaten dan satu kota madya di DIY. Sedangkan Untuk penguaman hasil seleksi dilaksanakan minggu ketiga Oktober 2023, mendatang.

Terpisah Ketua KPU Gunungkidul Ahmadi Ruslan Hani menjelaskan bahwa masa jabatan anggota KPU Gunungkidul periode 2018-2023 bakal berakhir pada 23 Oktober 2023. Meski masa kerja sudah habis pihaknya mengaku akan terus melaksanakan ketugasan untuk mengurus tahapan pemilu. (Bmp)

PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM DAN STUNTING Penguatan Ketahanan Ekonomi



KR-Asrul Sani

Dr dr Hasto Wardoyo, Pj Bupati Ni Made serta Dewo Isnu Broto Imam Santoso.

NANGGULAN (KR) - Dalam upaya penguatan ketahanan ekonomi, khususnya untuk menangani kemiskinan ekstrem dan stunting. Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan forum dialog. Menanggapi isu yang diangkat dalam forum dialog, Pj Bupati Kulonprogo Ni Made Dwiapanti Indrayanti MT mengajak seluruh komponen untuk berperan aktif dalam upaya mengatasi kemiskinan dan stunting.

"Ketika kita bicara kemiskinan ekstrem dan stunting memang menjadi tanggung jawab kita semua. Untuk mencapai target kemiskinan 0% di 2024, memang suatu hal yang tidak mudah. Walaupun dari sisi tingkat kemiskinan Kulonprogo masih tinggi yaitu 16%, tapi secara penurunan dari tahun 2021 ke 2022, Kulonprogo memiliki persentase penurunan angka kemiskinan yang tinggi sebesar 1,9%. Insya Allah, mudah-mudahan dengan menggeliatnya ekonomi masyarakat,

dapat meningkatkan kemampuan daya beli, sehingga kemiskinan kami bisa menurun," kata Ni Made di Kapanewon Nanggulan, Rabu (11/10).

Forum dialog menghadirkan lima narasumber berkompeten, Kepala BKKBN Dr dr Hasto Wardoyo, Nur Budi Handayani SST dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Drs Marcelinus Sukarno dari Ekso-bud Kesbangpol DIY, Kepala Dinas Koperasi UKM Kulonprogo, Iffah Mufidati MM dan budayawan Butet Kartaredjasa dengan moderator Kepala Kesbangpol Kulonprogo Budi Hartono MSi.

Beberapa usaha pemerintah daerah Kulonprogo dalam mendukung produk lokal melalui deklarasi slogan Bela Beli Kulonprogo dan kerjasama dengan toko-toko retail modern milik swasta untuk mendirikan Tomira (Toko Milik Rakyat). (Rul)

Pemkab Perpanjang Status Tanggap Darurat Kekeringan

PENGASIH (KR) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo akan memperpanjang status tanggap darurat kekeringan. Menurut Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD setempat, Budi Prastawa, pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap status tanggap darurat kekeringan yang diberlakukan pada 11 September - 11 Oktober 2023.

"Evaluasi kami lakukan bersama tujuh kapanewon terdampak kekeringan dan ketujuh kapanewon tersebut secepat agar status tanggap darurat kekeringan diperpanjang. Karena permintaan kebutuhan air bersih masih cukup tinggi, terutama di empat kapanewon

meliputi Samigaluh, Kokap, Girimulyo dan Kalibawang," kata Budi, Kamis (12/10).

Sedangkan permintaan air bersihnya minim tapi tetap ada yaitu Kapanewon Temon, Panjatan dan Pengasih. "Paling banyak permintaan dari Samigaluh dengan 83 titik dropping air bersih," jelasnya.

Merujuk hasil kesepakatan tersebut, BPBD mengusulkan pada Pj Bupati Kulonprogo untuk memperpanjang status tanggap darurat kekeringan selama sebulan ke depan. Perpanjangan diberlakukan mulai 12 Oktober-10 November 2023 dengan jumlah kuota air 270 unit tanki beserta berbagai fasilitas pendukung. "Kita mengandalkan

anggaran Belanja Tak Terduga (BTT)," jelasnya.

Pihak BPBD belum bisa memastikan berapa biaya yang dibutuhkan tapi diperkirakan sama dengan status tanggap darurat kekeringan pertama mencapai Rp 189.313.000. Biaya tersebut untuk dropping 250 tangki air bersih.

"Sampai sekarang kami masih melakukan dropping air bersih," ungkapnya seraya menambahkan jumlah permintaan air bersih meningkat tapi tidak signifikan. "Setidaknya ada sekitar tujuh ribu warga di tujuh kapanewon yang terdampak kekeringan di musim kemarau ini," ujar Budi.

(Rul)

PANEN LELE PERDANA SARANA MINA SURJAN

Sektor Perikanan Penggerak Perekonomian

TEMON (KR) - Sektor Perikanan memiliki peran penting bagi kehidupan. Satu sisi merupakan sektor penggerak perekonomian masyarakat, apabila dikelola secara benar melalui cara penangkapan dan cara budidaya yang baik, sehingga dapat memperoleh keuntungan. Di sisi lain, ikan merupakan sumber makanan yang penting untuk dikonsumsi, karena memiliki kandungan gizi yang tinggi.

"Ikan menjadi salah satu solusi utama bagi permasalahan gizi di masyarakat, karena ikan kaya akan gizi esensial yang sangat bermanfaat bagi kesehatan dan kecerdasan. Ikan mengandung protein, karbohidrat, vitamin, mineral dan asam lemak omega 3, 6,

9 yang baik manfaatnya untuk tubuh manusia. Kandungan asam amino dan omega 3 nya jauh lebih baik dibanding bahan pangan sumber protein lainnya," kata Pj Bupati Kulonprogo, Ni Made Dwiapanti Indrayanti MT saat panen lele perdana secara simbolis bantuan hibah sarana Mina Surjan Pokdakan Mina Makmur di Pedukuhan Menggungan Kalurahan Tawang Sari, Kapanewon Pengasih, Kamis (12/10).

Selain dihadiri Paniradya Pati Kaistimewaan Aris Eko Nugroho MSi dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulonprogo Ir Trenggono Trimulyo.

Lebih lanjut Ni Made mengungkapkan, manfaat

budidaya ikan konsumsi di antaranya bisa menjadi sumber pendapatan, bisa memenuhi kebutuhan gizi dan cara budidaya lebih mudah serta permintaan akan kebutuhan ikan konsumsi semakin meningkat.

"Sangat tepat budidaya ikan terus dikembangkan, karena ikan konsumsi akan terus dibutuhkan masyarakat sebagai salah satu sumber pangan," jelasnya.

Masalah utama dalam pengembangan perikanan budidaya ungkap Ni Made adalah pemasaran hasil produksi. Sejauh ini upaya yang sudah dilakukan oleh pokdakan adalah menjalin kerjasama dengan pemasar lokal Kulonprogo maupun luar daerah dan dengan instansi lain, misalnya melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Saya berharap bantuan-bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan para penerima bantuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Melalui kegiatan ini kita juga dapat melihat usaha tidak akan menipu hasil. Sesuatu yang kita usahakan benar-benar, maka hasilnya akan bagus," ujar Pj Bupati Ni Made. (Rul)

Kepala DKP setempat, Trenggono Trimulyo menjelaskan, pelaksanaan bantuan hibah sarana Mina Surjan adalah Dokumen Pelaksanaan Pengeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tentang Kegiatan Pengembangan Budaya Bahari, Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulonprogo Tahun Anggaran 2023.

Bantuan hibah sarana Mina Surjan 2023 merupakan kegiatan perdana dilaksanakan DKP. Bantuan ini diberikan kepada Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) di wilayah Kulonprogo yang memiliki lahan pertanian surjan dan pokdakan harus sudah terdaftar atau terregister di DKP Kulonprogo.

"Untuk 2023, kegiatan Mina Surjan dilaksanakan di empat pokdakan di tiga kapanewon dengan rincian di Kapanewon Wates dua pokdakan, dan di Kapanewon Panjatan dan Kapanewon Pengasih masing-masing satu pokdakan," jelasnya. (Rul)

RAPERDA PAJAK DAN RETRIBUSI DISEPAKATI

Tahun Depan Taman Budaya Disewakan

WONOSARI (KR) - Pemkab Gunungkidul menetapkan besaran tarif sewa Taman Budaya Gunungkidul (TBG) di Logadeng, Kapanewon Playen yang akan dilaksanakan mulai awal tahun 2024 mendatang. Besaran tarif sewa TBG tersebut hasil kesepakatan Bupati dengan DPRD. Tertuang dalam draf Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah salah satunya mengatur tentang sewa menyewa gedung Taman Budaya Gunungkidul.

Sesuai dengan raperda tersebut, biaya sewa TBG terbagi menjadi beberapa area meliputi area gedung lantai satu harga sewa Rp 3,2 juta untuk bisnis, sedangkan non bisnis sebesar Rp 2,7 juta dan kegiatan sosial Rp 2,4 juta sekali sewa. "Sesuai dengan rencana pemanfaatan TBG untuk umum mulai dilaksanakan awal tahun 2024," kata

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) TBG, Nur Agus Basuki, kemarin.

Secara rinci dijelaskan tentang harga sewa untuk masing-masing area, untuk auditorium di lantai dua dan tiga harga sewa Rp 16,3 juta untuk kegiatan bisnis dan non bisnis biaya sewa sebesar Rp 13,6 juta dan kegiatan sosial biayanya sebesar Rp11 juta. Biaya sewa joglo untuk kegiatan bisnis sebesar Rp 11,1 juta, non bisnis Rp 9,3 juta dan sosial Rp7,5 juta per kegiatan. Selain itu, juga ada sewa amphiteater Rp3 juta per hari; food court Rp 1,15 juta per kios per bulan, ATM center Rp 5 juta per space per tahun. Sementara untuk sewa di halaman parkir untuk kegiatan bisnis dipatok Rp 8,3 juta, non bisnis Rp 6,9 juta dan kegiatan sosial Rp 5,6 juta. "Pemanfaatan TBGT saat ini

hanya berkaitan dengan acara yang dimiliki Pemkab Gunungkidul," ujarnya.

Ketua Pansus Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, DPRD Gunungkidul, Sumaryanta mengatakan, pembahasan raperda sudah selesai dan telah mendapat persetujuan bersama tentang draf yang telah dibahas secara bersama-sama antara bupati dan DPRD. Saat ini prosesnya tinggal dikonsultasikan ke kementerian. Dalam raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjadi perda sapu jagat karena mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan penarikan pajak dan retribusi.

"Tidak hanya tarif retribusi masuk wisata, juga pengaturan biaya sewa TBG yang rencananya perda akan berlaku mulai awal 2024," ujarnya. (Bmp)

HARI KESEHATAN JIWA SE-DUNIA

Tingkatkan Layanan-Pembangunan Manusia

WONOSARI (KR) - Bupati Gunungkidul H Sunaryanta mendeklarasikan bahwa kesehatan jiwa merupakan hak semua orang. Pemkab beserta segenap lintas sektor dan masyarakat memberikan dukungan dan komitmen bersama menjadikan kesehatan jiwa sebagai bagian dari pembangunan manusia seutuhnya.

"Mendorong upaya promosi pentingnya kesehatan jiwa, pencegahan stigma dan perburukan masalah gangguan jiwa, pengobatan serta rehabilitasi jiwa yang menyeluruh demi terwujudnya Gunungkidul sebagai rumah bersama pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat." Bupati Gunungkidul H Sunaryanta di acara Peringatan Hari Kesehatan Jiwa di ruang Handayani Pemkab, Selasa (10/10).

Kegiatan ini merupakan Kerjasama pemkab dengan Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan dikemas dengan Sarasehan Penguatan



KR-Dedy EW

Peringatan Hari Kesehatan Jiwa di Pemkab.

Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) dalam mengimplementasikan kesehatan jiwa berbasis masyarakat. Acara diantaranya dihadiri Proyek Manager Kesehatan Jiwa berbasis Masyarakat Siswaningtyas, Kabid Kesmas Dinkes dr Diah Prasetyorini MKes, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos PPPA Dra Kurniatul Hiroh.

Siswaningtyas menambahkan, tahun ini adalah suatu kebahagiaan bagi Pusat Rehabilitasi YAKKUM, karena sudah 6 tahun mendapat dukungan terkait kesehatan jiwa. Tidak hanya dari pemerin-

tah kalurahan tetapi juga bupati Gunungkidul dan OPD lintas sektor.

"Kesehatan jiwa adalah hal kompleks, sehingga membutuhkan banyak peran dari berbagai pihak," ujar Siswaningtyas Tri Nugraheni Manajer Proyek Kesehatan Jiwa berbasis Masyarakat, Pusat Rehabilitasi YAKKUM.

Diungkapkan, TPKJM tingkat kabupaten diketuai Setda Gunungkidul. Sehingga TPKJM yang telah dibentuk menjadi motor penggerak dalam penanganan permasalahan gangguan jiwa yang ada di masyarakat. (Ded)



KR-Asrul Sani

Aris Eko Nugroho MSi (kanan) dan Ir Trenggono (tengah) panen lele perdana di Tawang Sari.

ASTRA DAIHATSU member of ASTRA

DAIHATSU Daihatsu Sahabatmu

All New XENIA SAHABAT KELUARGA

BELI SEKARANG SEMAKIN HEMAT!

Miliki mobil impian All New Xenia dengan angsuran ringan mulai dari 3 jutaan

| | |
|---------------------|---------------------|
| HARGA OTR MULAI | CICILAN MULAI |
| 233 JUTA-AN* | 3.8 JUTA-AN* |

Info lebih lanjut kunjungi Outlet Daihatsu terdekat di kota Anda atau hubungi : DAIHATSU ACCESS () 1-500-898

*Syarat dan ketentuan berlaku. Harga OTR Yogyakarta

DAIHATSU DAIHATSU ACCESS DAIHATSU ACCESS 1-500-898 DAISY 0811-9552-9111 daicast